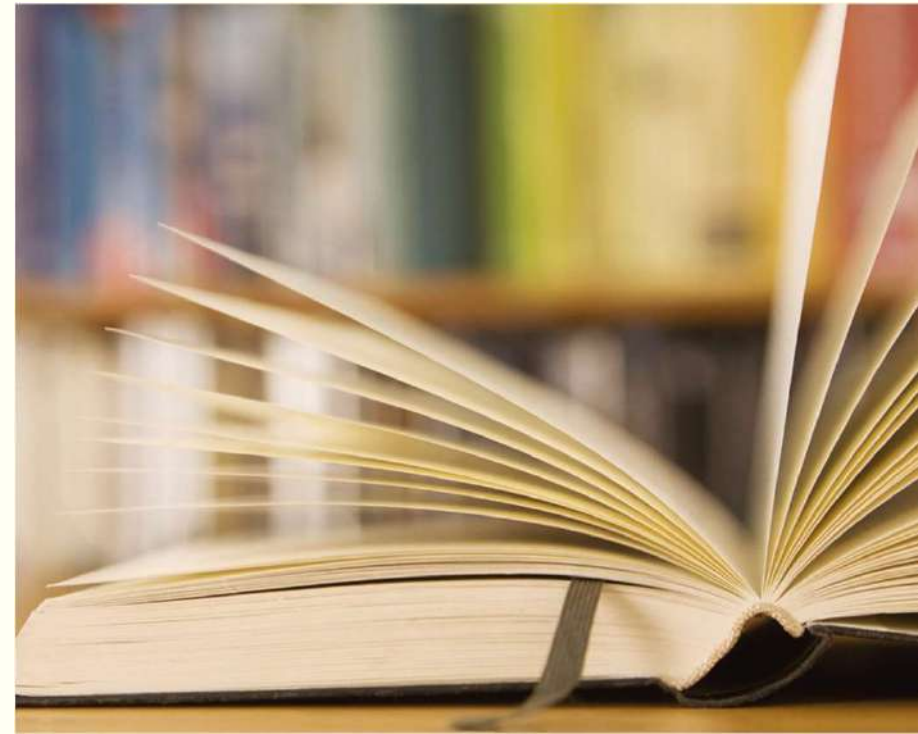




SPBE KABUPATEN MALINAU

Ramadiani, M.Kom., Ph.D



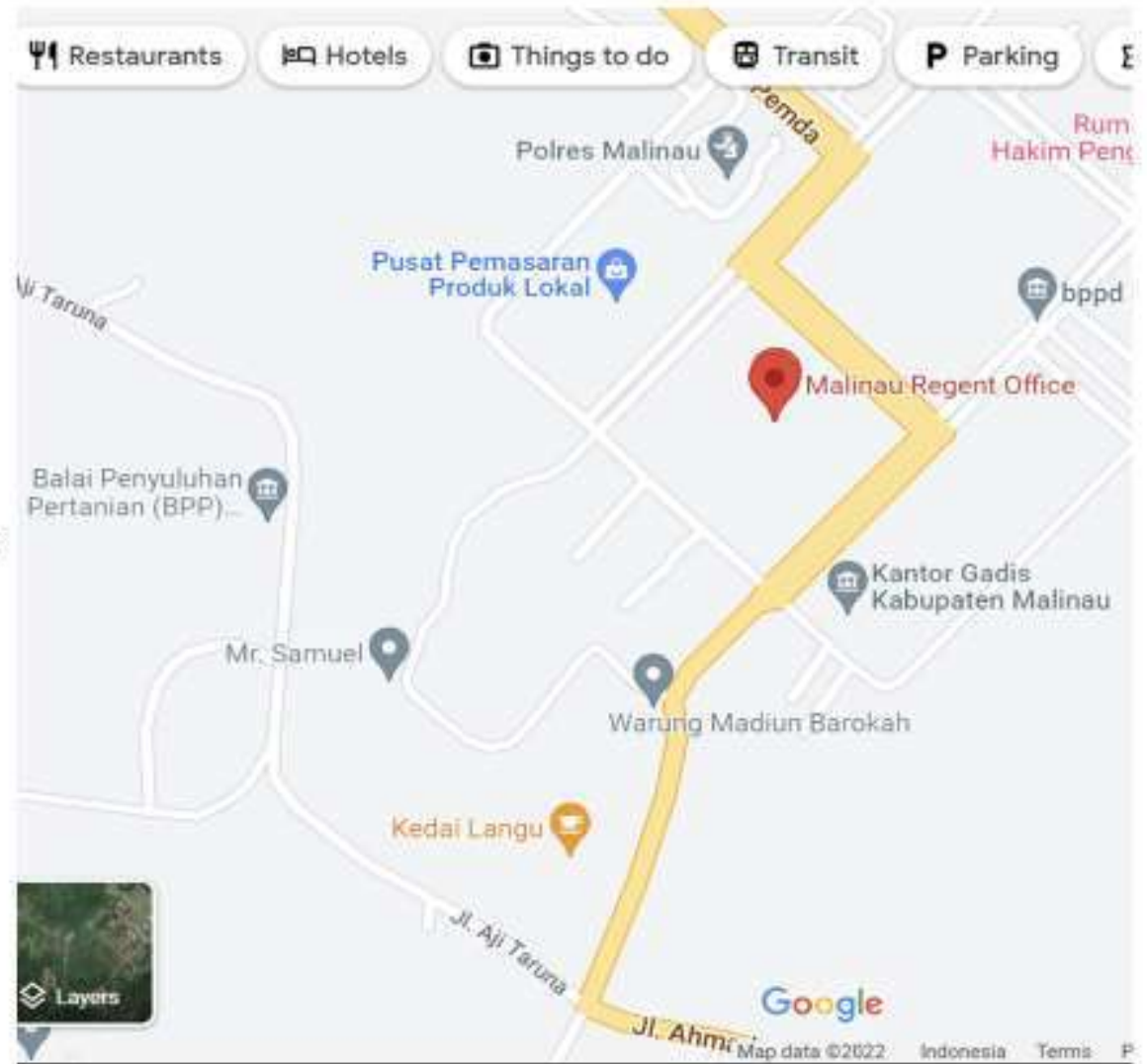
Sekilas tentang SPBE Kabupaten Malinau

Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020
tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Keputusan Menteri PANRB No. 962/2021
tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan
Evaluasi SPBE.

Ada 3 unsur penting dalam penerapan SPBE, yaitu:

- 1) Domain Kebijakan SPBE.
 - Kebijakan tata kelola SPBE.
 - Kebijakan layanan SPBE
- 2) Domain Tata Kelola.
 - Kelembagaan
 - Strategi dan Perencanaan
 - Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- 3) Domain Layanan SPBE.
 - Administrasi Pemerintahan
 - Pelayanan Publik/Kemudahan layanan pemerintah.





KRITERIA UMUM PADA TINGKAT KEMATANGAN KAPABILITAS PROSES

Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen

4

LEVEL 1. RINTISAN

- Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

LEVEL 2. TERKELOLA

- Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

LEVEL 3. TERDEFINISI

- Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.

LEVEL 4. TERPADU & TERUKUR

- Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.

LEVEL 5. OPTIMUM

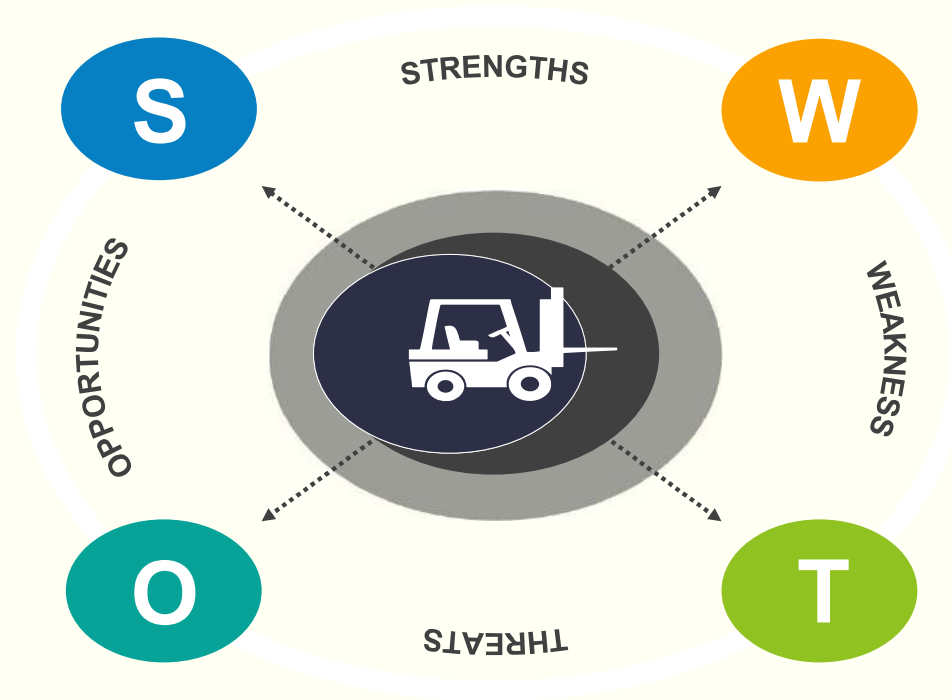
- Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.
- Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revaluasi dan evaluasi.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR: 050/11.a/SK-TIM/RENSTRA/2021 tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021- 2026:

- 1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 tahun mendatang;
- 3) Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- 4) Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang disertai pendanaan indikatif selama 5 tahun mendatang.
- 5) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 tahun mendatang.
- 6) Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

ANALISIS SWOT



OPD

OPD

OPD

OPD

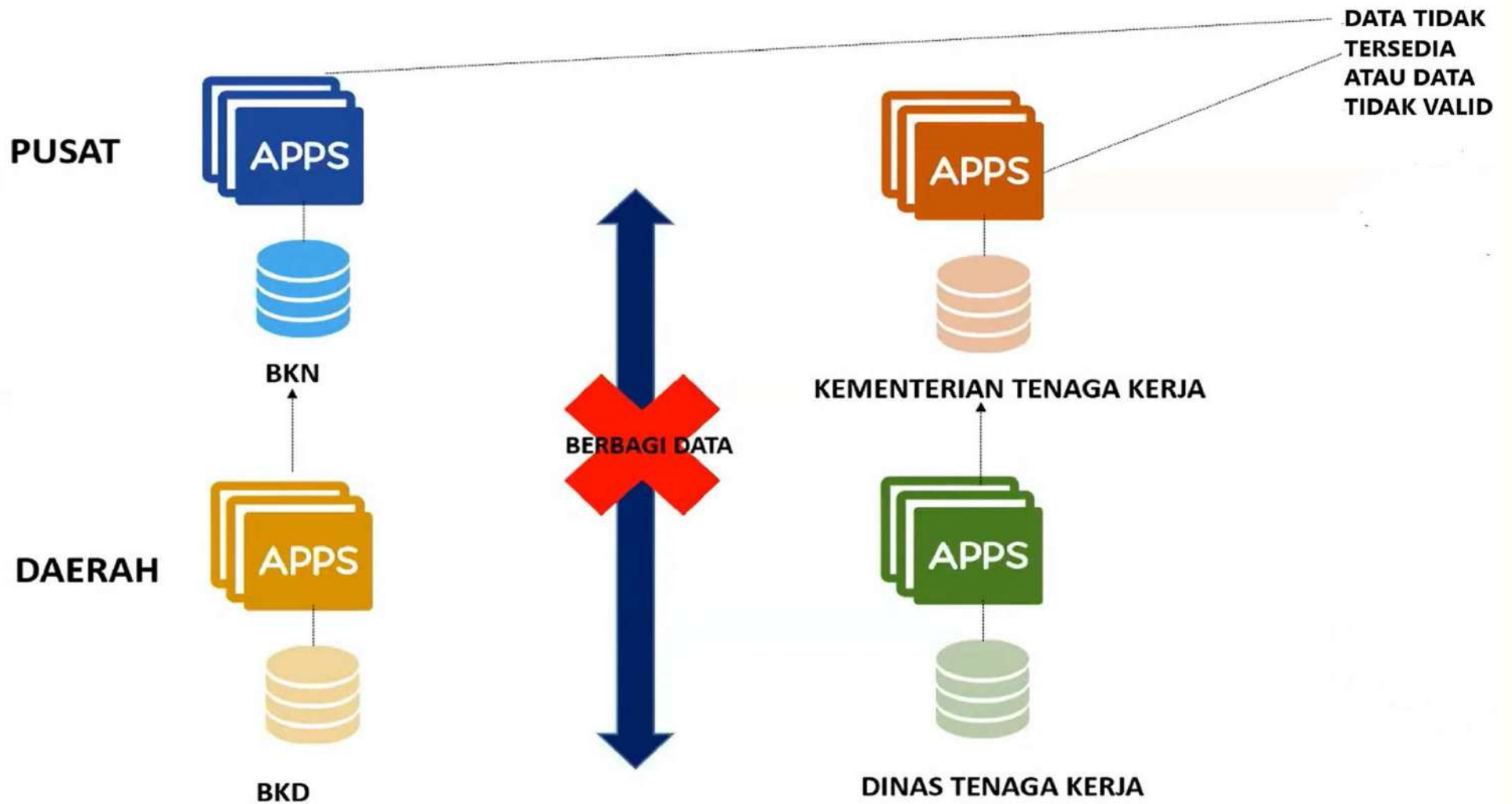


DISDUKCAPIL

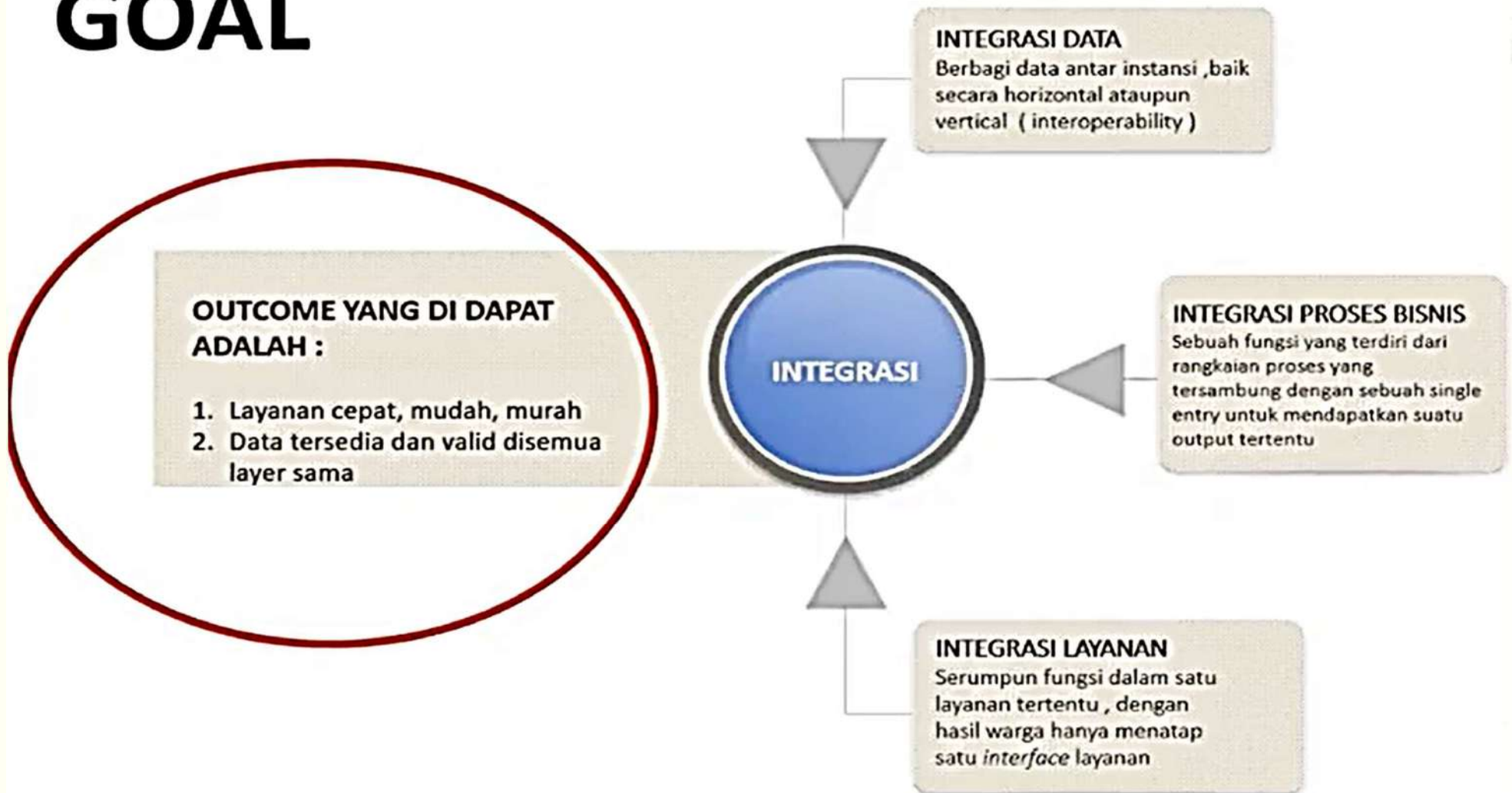
DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PU



GOAL



DESAIN INTEGRASI



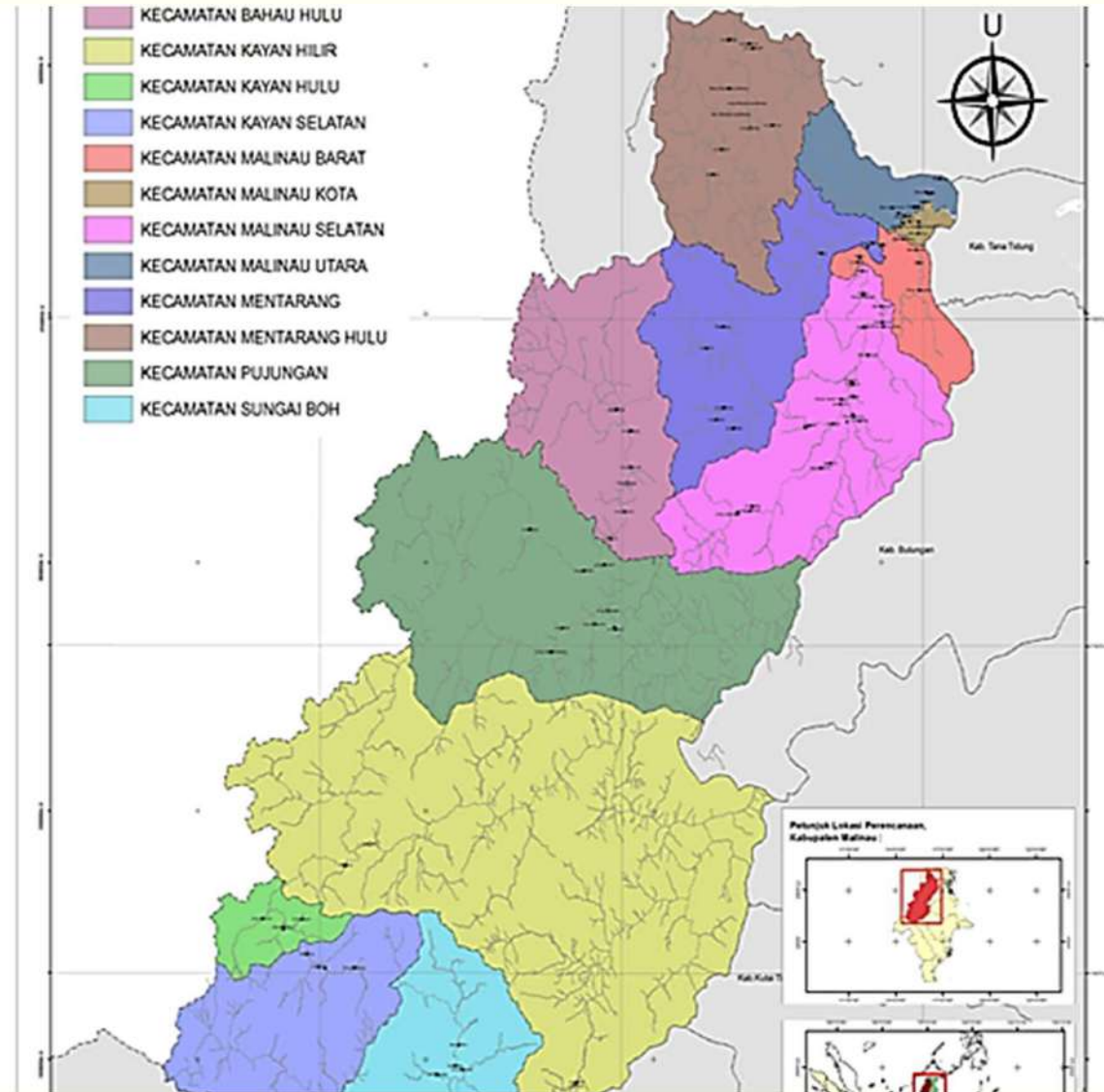
**IMPLEMENTASI
INTEGRASI**

ARSITEKTUR SPBE

- INTEGRASI PROSES BISNIS
- INTEGRASI DATA
- INTEGRASI APLIKASI (WEB SERVICE DAN INTERFACE)
- INTEGRASI JARINGAN

Wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan yakni:

1. Kecamatan Bahau Hulu
2. Kecamatan Kayan Hilir
3. Kecamatan Kayan Hulu
4. Kecamatan Kayan Selatan
5. Kecamatan Malinau Barat
6. Kecamatan Malinau Kota
7. Kecamatan Malinau Selatan
8. Kecamatan Malinau Selatan Hilir
9. Kecamatan Malinau Selatan Hulu
10. Kecamatan Malinau Utara
11. Kecamatan Mentarang
12. Kecamatan Mentarang Hulu
13. Kecamatan Pujungan
14. Kecamatan Sungai Boh
15. Kecamatan Sungai Tubu



Tabel 2.1.2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Status Desa di Kabupaten Malinau, 2018*

| Kecamatan | Status Desa | | | | Jumlah |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|------------|
| | Tertinggal | % | Tidak Tertinggal | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 010 Sungai Boh | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 |
| 020 Kayan Selatan | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 | 5 |
| 030 Kayan Hulu | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 |
| 040 Kayan Hilir | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 |
| 050 Pujungan | 8 | 88,89 | 1 | 11,11 | 9 |
| 060 Bahau Hulu | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 6 |
| 070 Sungai Tubu | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 | 5 |
| 080 Malinau Selatan Hulu | 7 | 87,50 | 1 | 12,50 | 8 |
| 090 Malinau Selatan | 7 | 77,78 | 2 | 22,22 | 9 |
| 100 Malinau Selatan Hilir | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 | 8 |
| 110 Mentarang | 8 | 88,89 | 1 | 11,11 | 9 |
| 120 Mentarang Hulu | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 | 7 |
| 130 Malinau Utara | 12 | 100,00 | 0 | 0,00 | 12 |
| 140 Malinau Barat | 7 | 77,78 | 2 | 22,22 | 9 |
| 150 Malinau Kota | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 |
| Kab. Malinau 2018* | 80 | 73,39 | 29 | 26,61 | 109 |

Sumber: DPMD Kabupaten Malinau
*) Data awal tahun

Tabel 2.1.3 Jumlah Perangkat Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018*

| Kecamatan | Jumlah Perangkat Desa | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| | Kepala Desa | Sekretaris Desa | Kasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 010 Sungai Boh | 6 | 6 | 18 |
| 020 Kayan Selatan | 5 | 5 | 15 |
| 030 Kayan Hulu | 5 | 5 | 15 |
| 040 Kayan Hilir | 5 | 5 | 15 |
| 050 Pujungan | 9 | 9 | 27 |
| 060 Bahau Hulu | 6 | 6 | 18 |
| 070 Sungai Tubu | 5 | 5 | 15 |
| 080 Malinau Selatan Hulu | 8 | 8 | 24 |
| 090 Malinuu Selatan | 9 | 9 | 27 |
| 100 Malinau Selatan Hilir | 8 | 8 | 24 |
| 110 Mentarang | 9 | 9 | 27 |
| 120 Mentarang Hulu | 7 | 7 | 21 |
| 130 Malinau Utara | 12 | 12 | 26 |
| 140 Malinau Barat | 9 | 9 | 27 |
| 150 Malinau Kota | 6 | 6 | 18 |
| Kabupaten Malinau | 109 | 109 | 327 |

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Malinau
*) Data awal tahun

SISTEM TELEKOMUNIKASI KABUPATEN DAN KECAMATAN

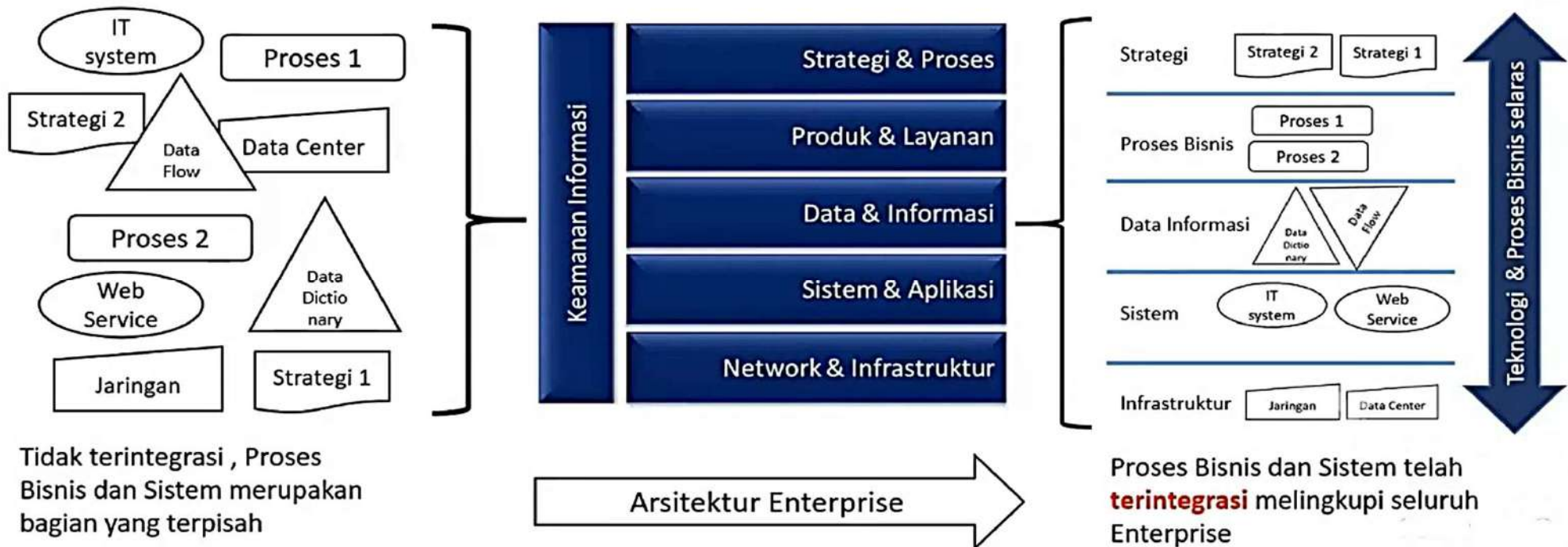


Saat ini Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial yang luar biasa besar, misalnya Facebook (62 juta), Twitter (19,5 juta), Line (14 juta), atau Path (4 juta).

ARSITEKTUR ENTERPRISE /ARSITEKTUR SPBE

Analisis dan dokumentasi dari sebuah instansi (enterprise) dalam kondisi saat ini dan masa depan, dengan perspektif pada Strategi, Proses Bisnis dan Teknologi

ARSITEKTUR ENTERPRISE = STRATEGI + PROSES BISNIS + TEKNOLOGI



ARSITEKTUR SPBE

TUJUAN



DASAR HUKUM

Pasal 7

Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Pasal 8

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

Pasal 6

Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE Instansi Pusat

Arsitektur SPBE Pemda

Domain Arsitektur



Misi Pembangunan Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021–2026

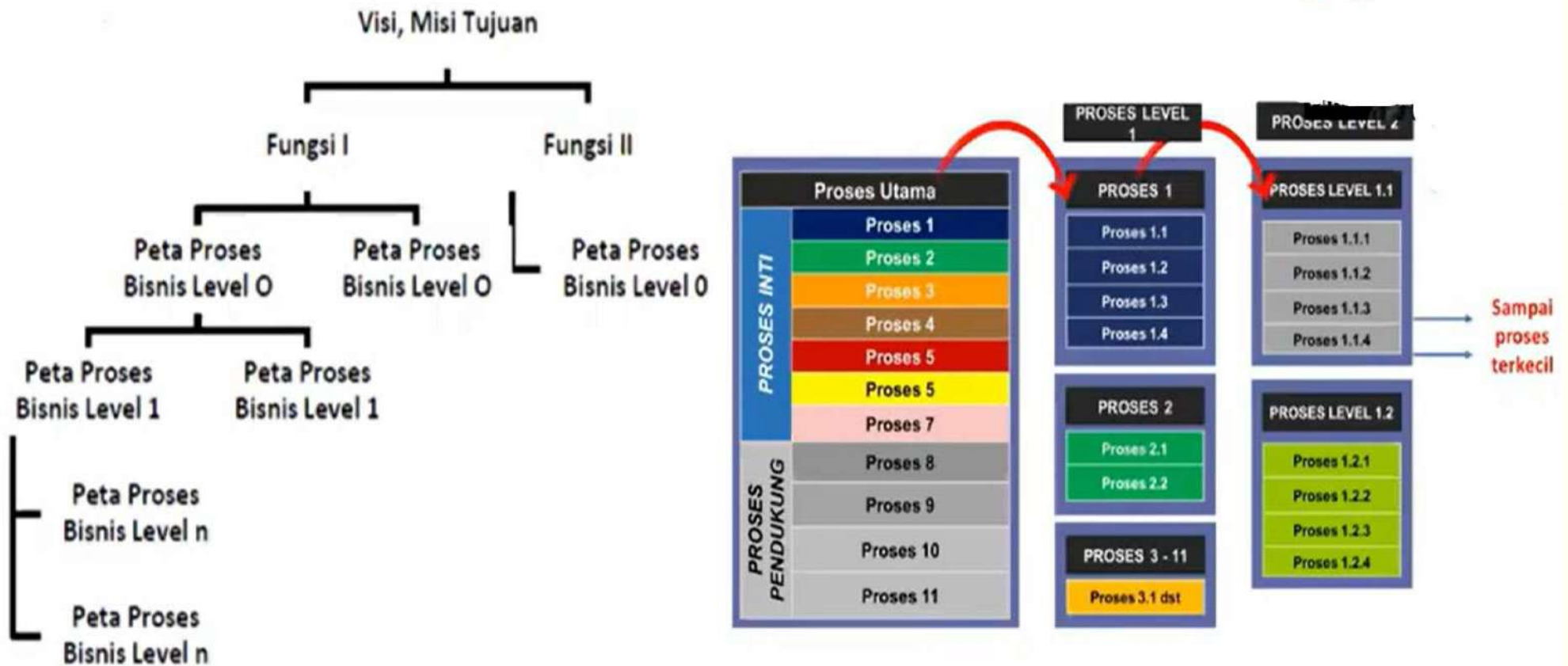
- 1) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;** melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tenteram, harmonis dan bebas bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat;
- 2) **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal;** melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat koperasi dan UMKM;
- 3) **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;** membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas;
- 4) **Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;** melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Pembangunan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, Sejahtera dan Profesional

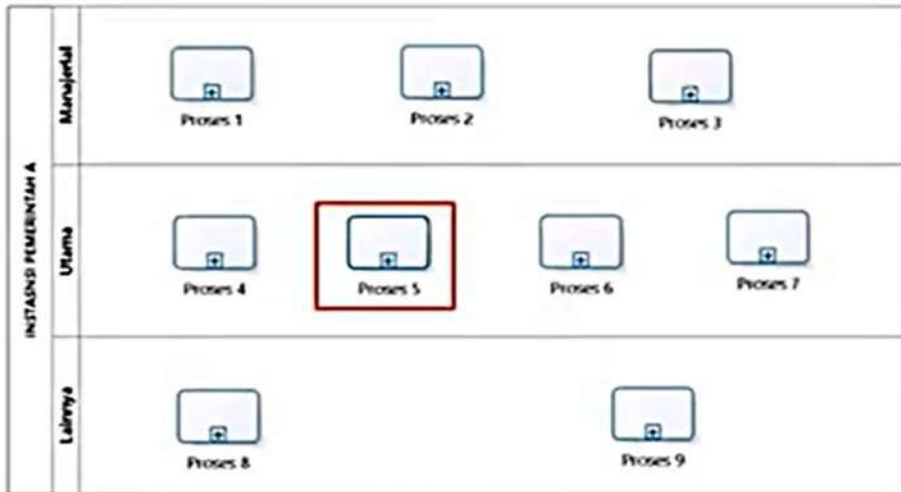
| | | | | | |
|------------|---|--|--|---|-------------------------------|
| Manajerial | Proses 1 | Proses 2 | Proses 3 | Proses 4 | |
| | Perencanaan | Pengadaan dan Penganggaran | Monitoring dan Evaluasi | Pelaporan dan langkah-langkah Perbaikan | |
| | Proses 5 | Proses 6 | Proses 7 | Proses 8 | |
| Inti | membangun SDM Malinau yang Unggul; sehat, cerdas, menguasai iptek, bebas konflik, berkarakter dan berbudaya | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal; | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas | Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan; program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat. | |
| Pendukung | Proses 9 | Proses 10 | Proses 11 | Proses 12 | Proses 13 |
| | Penatausahaan Keuangan | administrasi kepegawaian dan tata kelola | Pengembangan dan pemanfaatan TIK | Pengelolaan kebijakan dan perundang-undangan serta kearsipan | Pengelolaan Layanan Pengaduan |

SISTEMATIKA PROSES BISNIS

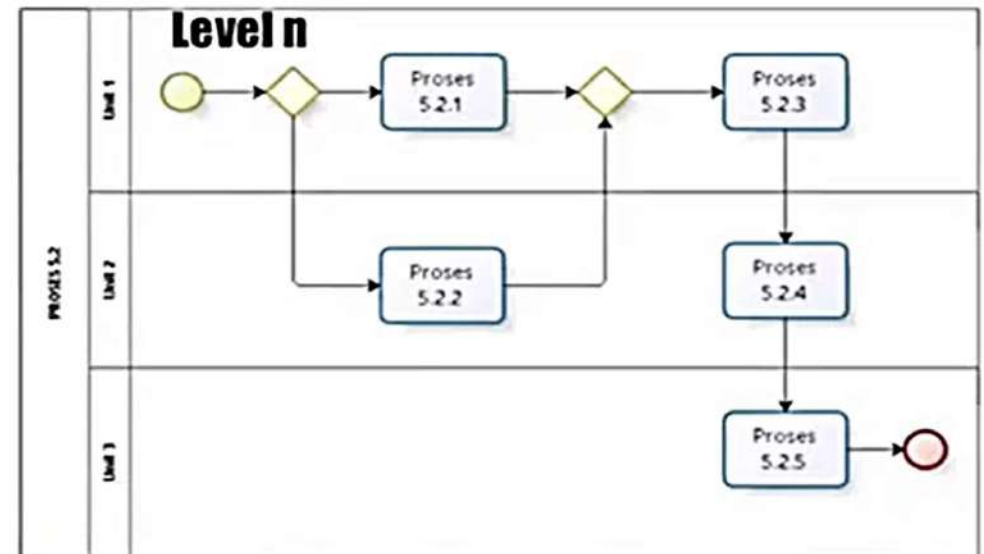


LEVEL/TINGKATAN PROBIS

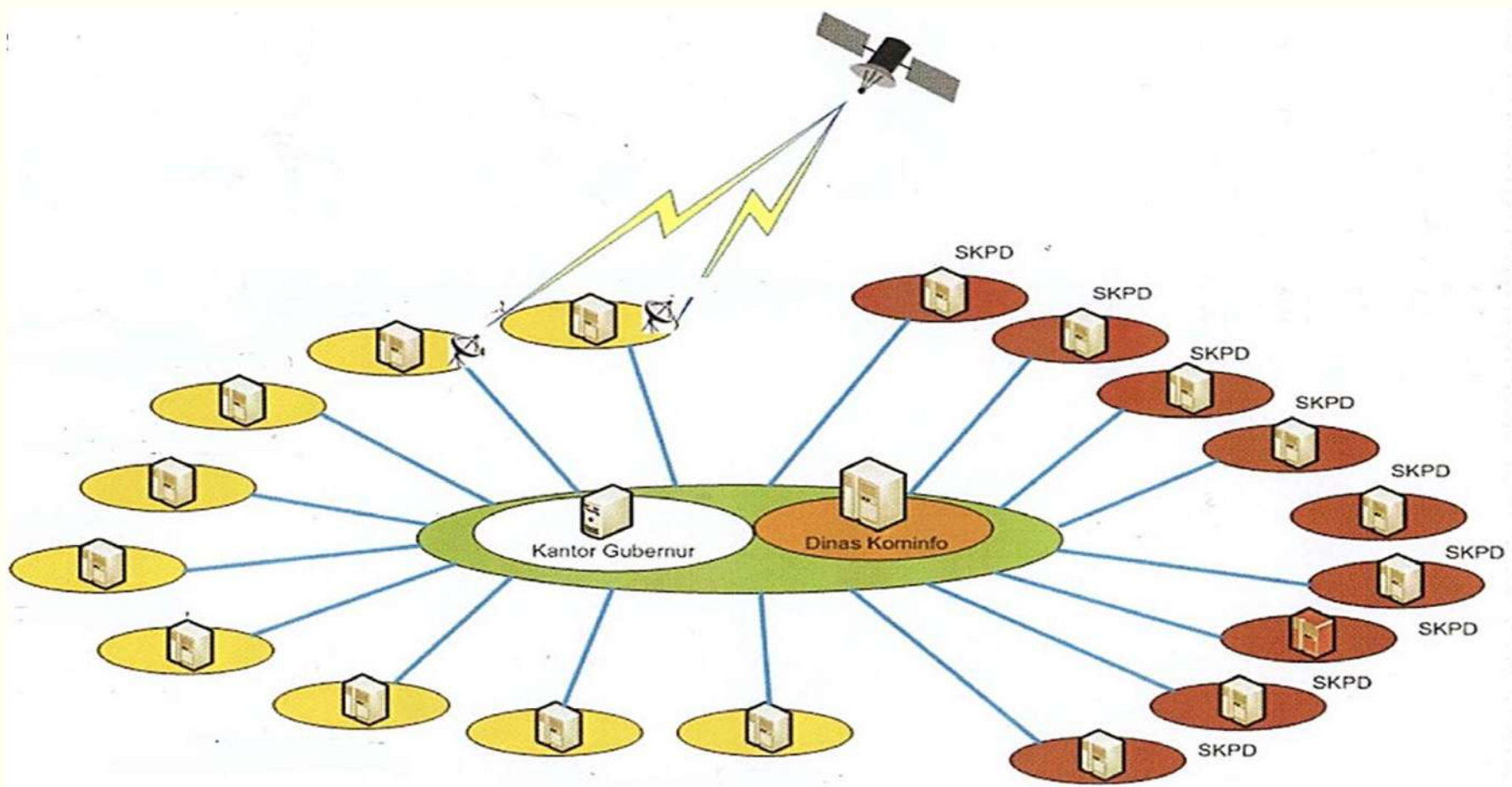
Level 0



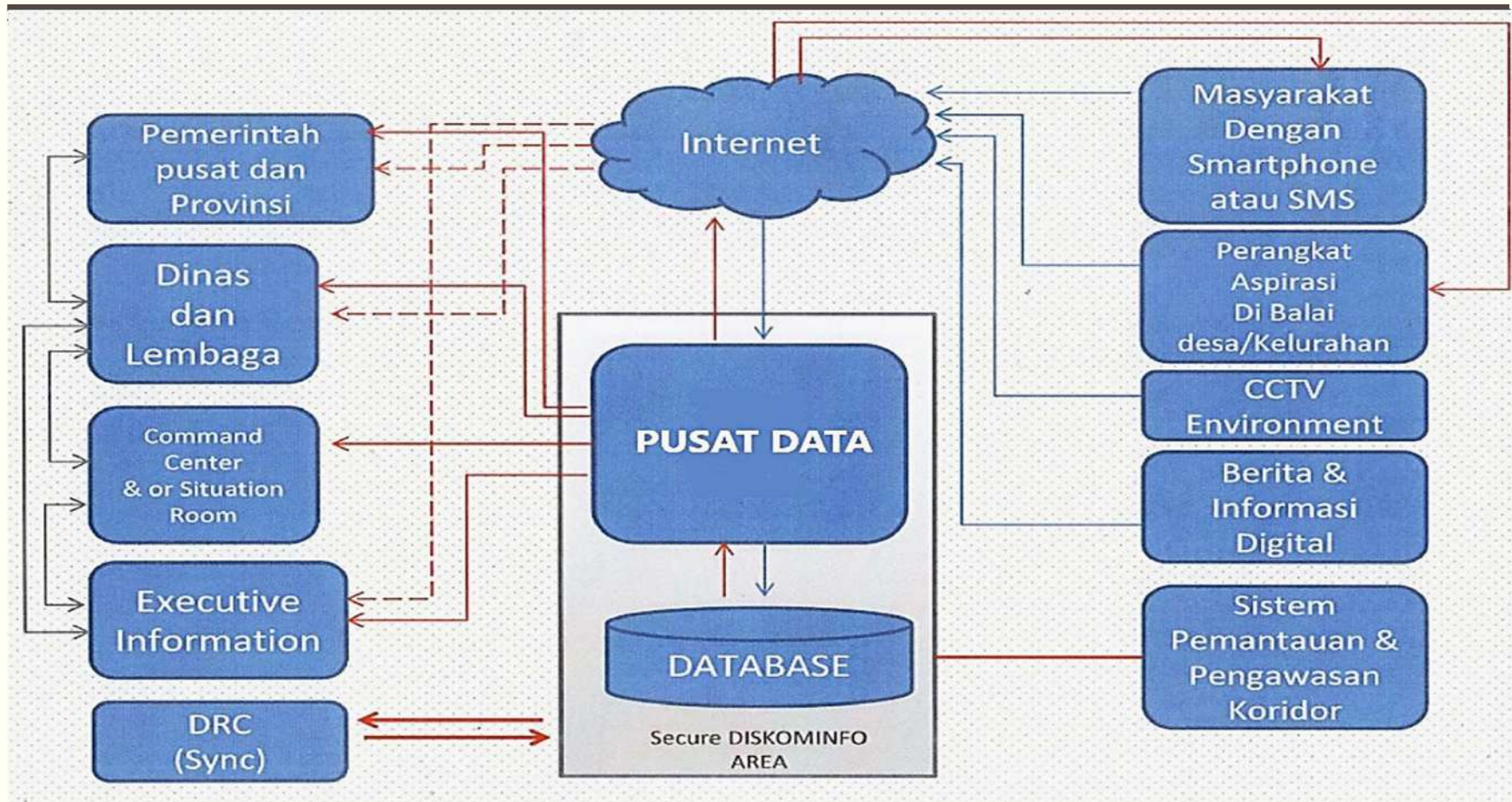
Level 1



Topologi Jaringan untuk SKPD dan OPD di Kab. Malinau



ARSITEKTUR NETWORK



| No. | Indikasi Kegiatan SPBE kab. Malinau | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Kajian Pembangunan SPBE Kab. Malinau | | | | | | | |
| 2 | Menyusun Masterplan SPBE Kab. Malinau | | | | | | | |
| 3 | Menyusun Master Data SPBE Kab. Malinau | | | | | | | |
| 4 | Penguatan dan Peningkatan Pusat Data Kab. Malinau | | | | | | | |
| 5 | Pengembangan Sistem Informasi (Dashboard) Pimpinan | | | | | | | |
| 6 | Pembangunan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (Penyusunan RENJA, RKPD, KUA dan PPAS) | | | | | | | |
| 7 | Penyediaan Infrastruktur jaringan (fiber optik) | | | | | | | |
| 8 | Pembangunan Aplikasi MONEV pelaksanaan kegiatan Pembangunan | | | | | | | |
| 9 | Penyediaan aplikasi Geospasial Terintegrasi | | | | | | | |
| 10 | Digitalisasi Seleksi Penerimaan Bantuan Sosial | | | | | | | |
| 11 | Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Data Spasial Penerima Bansos (Kab, Kelurahan dan RT/RW) | | | | | | | |
| 12 | Penyusunan dan Pengesahan regulasi pendukung SPBE | | | | | | | |
| 13 | Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan | | | | | | | |
| 14 | Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Potensi Kab. Malinau | | | | | | | |
| 15 | Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen pelaporan pemerintahan | | | | | | | |
| 16 | Pembangunan dan manajemen Pusat data di kelurahan dan RT/RW | | | | | | | |
| 17 | Pendampingan aplikasi (Penyusunan RENJA, RKPD, KUA dan PPAS) | | | | | | | |
| 18 | Pembangunan sistem Pelayanan dan dokumentasi elektronik | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

RAPAT ZOOM Bersama Diskominfo Malinau dan OPD-OPD

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there is a 'Recording' indicator and a 'View' button. The main content is a presentation slide from Microsoft Word. The slide title is 'BAB III Analisa Kondisi SP8E dan Kebutuhan'. The slide content is as follows:

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 2 | Kualifikasi SDM TI | Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TK tingkat lanjut (advance) pada 37 OPD adalah sbb: <ul style="list-style-type: none">38 pegawai dengan kemampuan bidang pengembangan aplikasi (developer)12 pegawai dengan kemampuan bidang pengelolaan server dan jaringan22 pegawai dengan kemampuan bidang pemeliharaan (technical support) | Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM TI, baik kualifikasi basic TI maupun advanced TI melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, maupun sertifikasi. Peningkatan kompetensi web programming atau web development SDM TI khususnya developer (programmer, analyst, database engineer). |
|---|--------------------|---|--|

At the bottom right of the slide, there is a small video feed of a participant named 'Zainal Arifin'. The Zoom control bar at the bottom includes buttons for 'Unmute', 'Stop Video', 'Participants' (39), 'Chat', 'Share Screen', 'Reactions', 'Apps', 'More', and a red 'Leave' button.

The screenshot shows the 'Participants (39)' list in a Zoom meeting. It includes a search bar 'Find a participant' and a list of participants with their names, roles, and status icons (mute, video, chat). The participants listed are:

- Ramadiani (Me)
- DISKOMINFO KAB.MALINAU (Host)
- Zainal Arifin
- Agus Girsang
- Ahmed Chari Syaafaadi_Bagian Organisasi Setka...
- Bagian Perekonomian dan SDA
- Bagian Perencanaan & Keuangan Setkab
- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
- Bagian Umum
- Bappeda Malinau
- Berty Raintung
- BPBJ

At the bottom of the list, there are 'Invite' and 'Unmute Me' buttons.

Participants (36)

Find a participant

- DM DISNAKER MALINAU
- D/ Dispora / H.Ujud Primandiyadi
- D DPMPTSP-ERLINDA
- FK Francis, Kec.Malinau Utara
- Grace Djalung
- I Inspektorat
- J Jonlayri
- KM Kesbangpol Malinau
- OF OPPO F9
- PM PERIKANAN MALINAU
- PI Prita's iPhone
- Satpol PP & Damkar

Invite Unmute Me

9:35 AM 11/16/2022 24

Participants (36)

Find a participant

- Grace Djalung
- I Inspektorat
- J Jonlayri
- KM Kesbangpol Malinau
- OF OPPO F9
- PM PERIKANAN MALINAU
- PI Prita's iPhone
- Satpol PP & Damkar
- SB sekban bppd malinau
- TS TECNO SPARK 6 Go
- TW Tjito widjaja
- OC OPPO CPH2219

Invite Unmute Me

9:35 AM 11/16/2022 24

Pendekatan Proses - **PLAN DO CHECK ACT**



Plan:

Menetapkan sasaran sistem dan prosesnya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi, serta mengidentifikasi dan menangani risiko dan peluang;



Do:

Melaksanakan apa yang telah direncanakan



Check:

Memantau dan (jika berlaku) mengukur proses serta produk dan jasa yang dihasilkannya terhadap kebijakan, sasaran, persyaratan dan kegiatan yang direncanakan, dan melaporkan hasilnya;



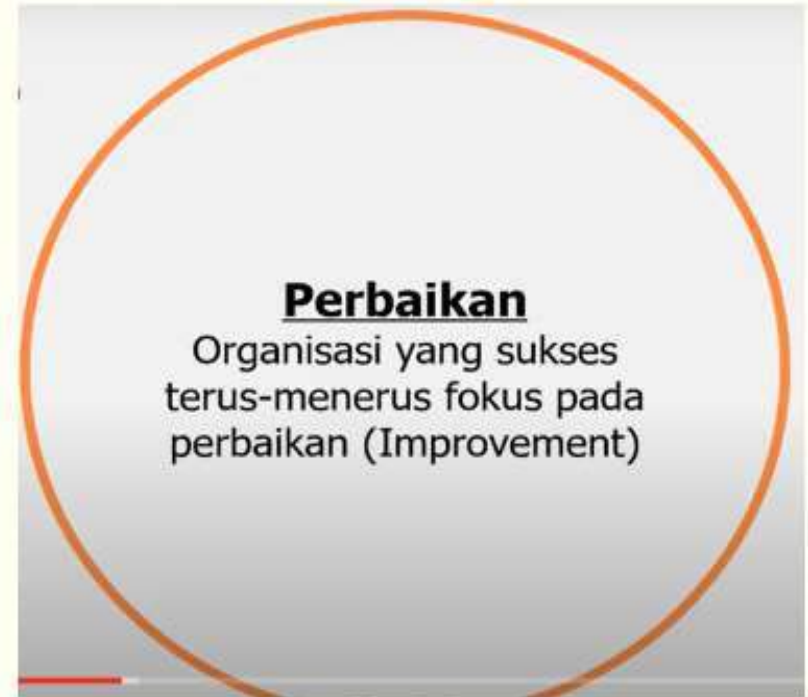
Act:

Mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja, sesuai keperluan.



LAPORAN DRAFT HASIL

TERIMA KASIH



KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Ramadiani, M.Kom., Ph.D

**Ketua Pusat Penelitian Tropical Engenering,
Bidang Informatika**

Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman



Biodata Ketua Peneliti

1. Nama Lengkap Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D
2. Jenis Kelamin P
3. Jabatan Ketua Pusat Penelitian Tropical Engineering, FT UNMUL
4. NIDN 0001117202
5. Nomor Telepon/HP 085250501973
7. E-mail ilkom.ramadiani@gmail.com
ramadiani@unmul.ac.id
8. Pendidikan S1 UNMUL Thn lulus 1997
S2 UI Thn lulus 2001
S2 UGM Thn lulus 2005
S3 UPM Thn lulus 2015
9. **Pengalaman Penelitian**
2016
Kemenristek dikti
Rp.135.000.000,-
2018-2019
Kemenristek dikti
Rp.293,316.000,-
2018-2019
Kemenristek dikti
Rp.182.781.000,-
2019-2021
Kemenristek dikti
Rp. 407,424.000,-
2021-2023
Kemenristek dikti
Rp. 500,950.000,-
2022
BOPTN UNMUL
Rp. 70,000.000,-
Dinas Sosial Samarinda
Rp. 150,000.000,-
Diskominfo Malinau
Rp. 120,000.000,-
Kemendikbudristek
Rp. 150.000.000,-
Ketua Sebagai **Ketua** dalam Konferensi Ilmiah Internasional Tahun 2016 2nd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) Tahun 2016 pada tanggal 26-27 Oktober 2016 di Samarinda.
Sebagai **Ketua** dalam Penelitian Pemanfaatan Konten e-Learning pada Smartphone
Sebagai **Anggota** TPM pada penelitian Implementasi Based Tracking Method dalam “Magic Boosed” – 3D Book Solid of Education Sebagai Media Pembelajaran Model Bangun Ruang 3D Augmented Reality
Sebagai **Ketua** dalam Penelitian Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan
Sebagai **Ketua** dalam Penelitian Pengaruh integrasi kurikulum kampus merdeka terhadap pertumbuhan inkubator bisnis dan lulusan yang bekerja di bidang Startup dan Ekonomi Digital di Samarinda
Sebagai **Ketua** pada Pusat Penelitian Fakultas Teknik UNMUL
Sebagai **Ketua** dalam Penelitian Monitoring, Evaluasi, Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin di Kota Samarinda
Sebagai **Ketua** dalam Penelitian Pembuatan Grand Deisgn SPBE Kabupaten Malinau
Sebagai **Anggota** dalam Penelitian Digitalisasi Kandang Ayam Pintar berbasis IoT di Kalimantan Timur
10. **Pengalaman sebagai Narsum**
2022 Literasi Digital:”Hari Kebangkitan Teknologi Nasional” di TVRI Kaltim
2022 Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO (9001-2015) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman
2021 Literasi Digital;”Transaksi Digital Menjawab Kemudahan Bisnis”, Relawan TIK Nasional, ICT Watch, DISKOMINFO KALTIM, Jawara Internet Sehat.
2021 Fenomena Cyber Bullying dan Cyber Stalking, DISKOMINFO KALTIM
2021 Aplikasi Pembelajaran on line untuk Sekolah SMP dan SMA di Samarinda
2019 Melatih keterampilan karyawan DISKOMINFO Kota Samarinda
2016 Narsum Seminar Nasional Cyber Province Kalimantan Timur
2016 Membangun Tracer study untuk mahasiswa alumni UNMUL di LP3M UNMUL
2015 Membangun Aplikasi Evaluasi dosen unmul di LP3M UNMUL
2015 Membuat SOP data online terintegrasi di UNMUL



PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

Tujuan SPBE

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan Penyelenggaraan SPBE.

Outcome SPBE

Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Terwujudnya keamanan informasi pemerintah



MASTERPLAN SMART CITY

Gerakan 100 Smart City Indonesia, *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City*, Dirjen Aptika, Kemenkominfo 2017 (program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan).

ARSITEKTUR SPBE



- 1) **Perpres No. 95 Tahun 2018** tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*
- 2) **Permenpan-RB No. 5 Tahun 2018** tentang *Pedoman Evaluasi SPBE*
- 3) **Perpres No. 39 Tahun 2019** tentang *Satu Data Indonesia*
- 4) **Permenkominfo No. 8 Tahun 2019** tentang *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika*
- 5) **Permendagri No. 98 Tahun 2018** tentang *sistem Informasi Pembangunan Daerah*
- 6) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

DOMAIN ARSITEKTUR ENTERPRISE



LAYANAN SPBE

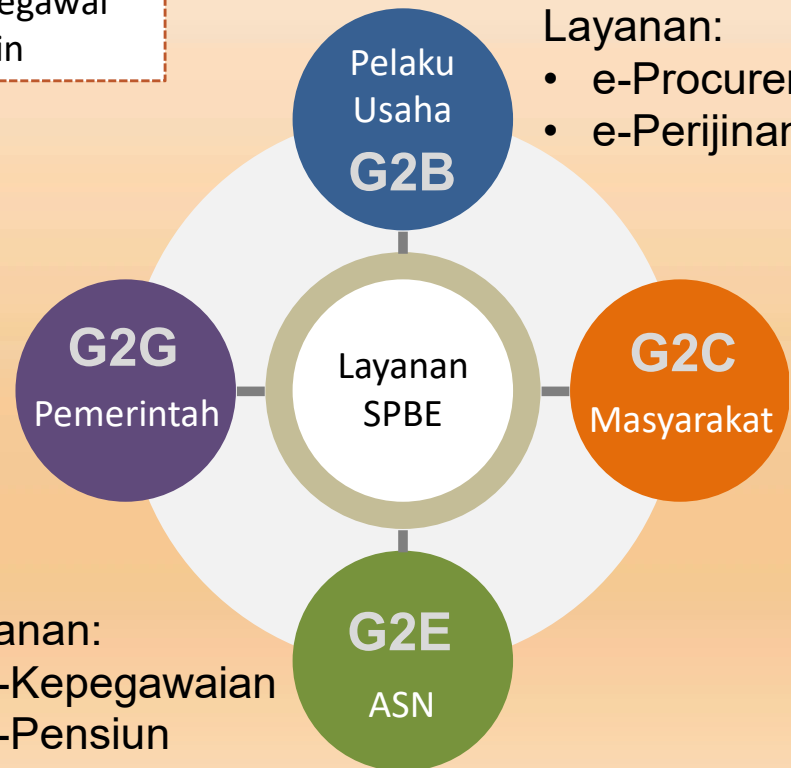
Pengguna SPBE: Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai ASN, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain



Perpres 95/2018 merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

- Layanan:
- e-Office
 - e-Planning
 - e-Budgeting
 - e-Monev

- Layanan:
- e-Kepegawaian
 - e-Pensiun



- Layanan:
- e-Procurement
 - e-Perijinan

- Layanan:
- e-Pengaduan
 - e-Kesehatan
 - e-Pendidikan

PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE



**TATA KELOLA
SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK**



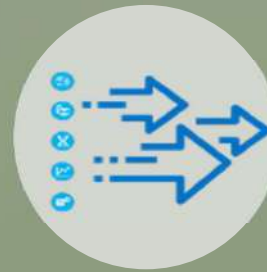
**MANAJEMEN
SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK**



**AUDIT
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**



**PENYELENGGA
RA SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK**



**PERCEPATAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK**



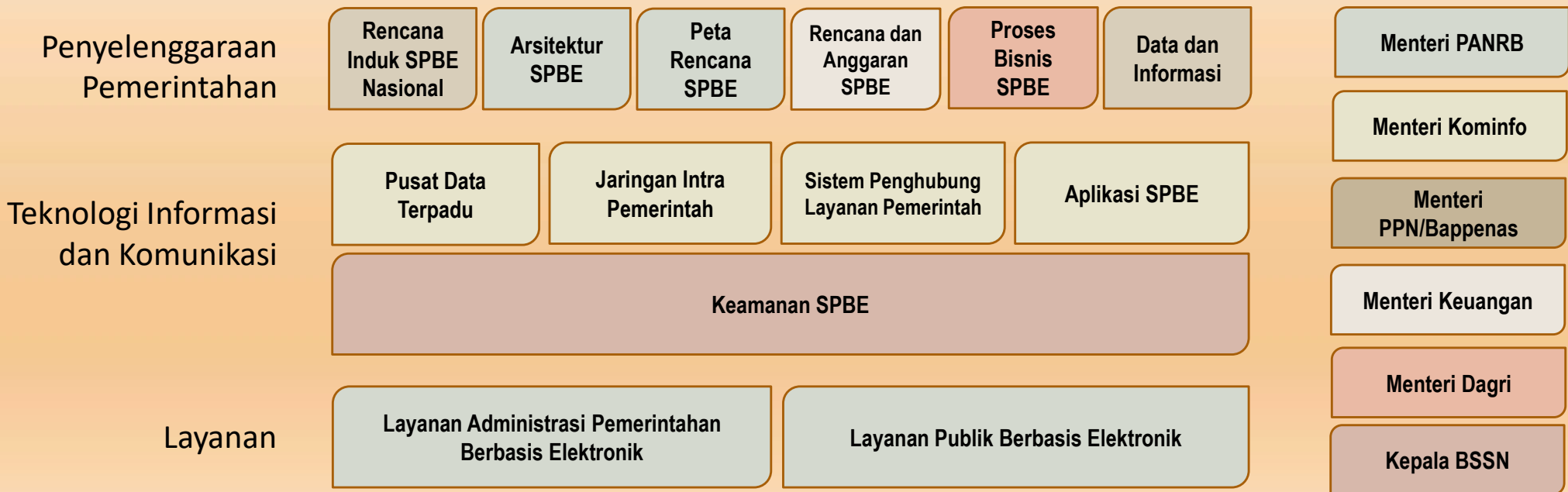
**PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK**



TATA KELOLA SPBE

Definisi Tata Kelola SPBE

kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu



RENCANA INDUK SPBE

Memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis pembangunan SPBE secara nasional

Disusun berdasarkan RPJMN dan Grand Design Reformasi Birokrasi dengan jangka waktu 20 tahun

Disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas

RENCANA INDUK SPBE

VISI SPBE

TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG TERPADU DAN MENYELURUH UNTUK MENCAPAI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKINERJA TINGGI



MISI SPBE

Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas

Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal

Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi

RENCANA INDUK SPBE

Tata Kelola SPBE

- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi SPBE.
- Penguatan kebijakan SPBE.

Layanan Publik

- Layanan SPBE berorientasi kepada pengguna.
- Peningkatan kualitas layanan SPBE.

T I K

- Penyelenggaraan infrastruktur SPBE.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi umum.
- Penyediaan data dan informasi berkualitas.

SDM SPBE

- Pengembangan kepemimpinan SPBE.
- Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

STRATEGI

RENCANA INDUK SPBE

Tata Kelola SPBE

- Tim Koordinasi SPBE
- Arsitektur SPBE
- Kebijakan SPBE
- Evaluasi SPBE.

Layanan Publik

- Survei Pengguna SPBE
- Portal pelayanan publik
- Portal administrasi pemerintahan
- Manajemen layanan

T I K

- Pusat data nasional
- Jaringan intra pemerintah
- Sistem penghubung layanan pemerintah
- Teknologi layanan berbagi pakai
- Portal data nasional
- Sistem keamanan informasi
- Teknologi kecerdasan buatan

SDM SPBE

- Promosi literasi
- Kapasitas ASN
- Forum kolaborasi SPBE

INISIATIF

ARSITEKTUR SPBE

Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

Arsitektur SPBE
Nasional

Arsitektur SPBE
Instansi Pusat

Arsitektur SPBE
Pemda

Arsitektur SPBE

Arsitektur Bisnis 

Arsitektur Data 

Arsitektur Layanan 

Arsitektur Infrastruktur 

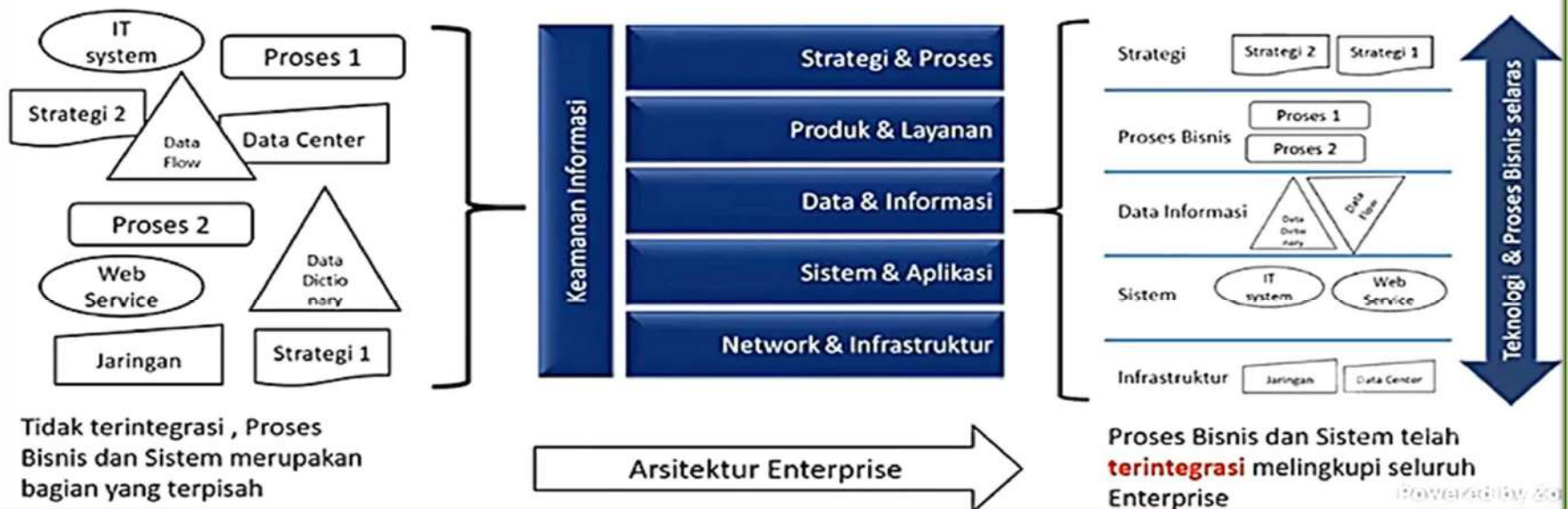
Arsitektur Aplikasi 

Arsitektur Keamanan 

ARSITEKTUR SPBE

Analisis dan dokumentasi dari sebuah instansi (enterprise) dalam kondisi saat ini dan masa depan, dengan perspektif pada Strategi, Proses Bisnis dan Teknologi

ARSITEKTUR ENTERPRISE = STRATEGI + PROSES BISNIS + TEKNOLOGI



PETA RENCANA SPBE

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun

Peta Rencana SPBE Nasional

Berdasarkan
Arsitektur SPBE
Nasional dan RPJMN

Disusun oleh Kemen
PANRB

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat

Berdasarkan Peta
Rencana SPBE
Nasional, Arsitektur
SPBE Instansi Pusat
dan Renstra

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peta
Rencana SPBE
Nasional, Arsitektur
SPBE Pemda,
RPJMD

PERBEDAAN JENIS ARSITEKTUR SPBE

| | Arsitektur SPBE Nasional | Arsitektur SPBE Instansi Pusat | Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah |
|------------------------|--|--|--|
| Pedoman | Rencana Induk SPBE Nasional & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional | Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Instansi Pusat | Arsitektur SPBE Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| Ditetapkan Oleh | Peraturan Presiden | Pimpinan Instansi pusat masing-masing | Kepala daerah masing-masing |
| Jangka Waktu | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun |
| Reviu | Pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu | Pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu | Pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu |

RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE

- Sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran
- Pengendalian perencanaan dan penganggaran yang terpadu

Instansi Pusat

- Berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat.
- Keterpaduan oleh KemenPPN/Bappenas dan Kemenkeu

Pemerintah Daerah

- Berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemda
- Keterpaduan oleh Bappeda

PROSES BISNIS

Proses Bisnis

- Sebagai pedoman untuk penggunaan data, aplikasi, keamanan, dan layanan yang terintegrasi
- Pedoman disusun oleh Kementerian PANRB

Instansi Pusat

- Berdasarkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- Koordinasi dengan Kementerian PANRB

Pemerintah Daerah

- Berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
- Koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kemedagri

DATA DAN INFORMASI

Data dan Informasi

- Semua jenis data dan informasi yang dimiliki/diperoleh dari pihak lain
- Interoperabilitas data

Instansi Pusat

- Berdasarkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- Koordinasi dengan Kementerian PPNN/Bappenas

Pemerintah Daerah

- Berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
- Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas

INFRASTRUKTUR SPBE



Penggunaan **Pusat Data nasional** bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



Penggunaan **Jaringan Intra pemerintah** bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah



Penggunaan **Sistem Penghubung Layanan pemerintah** bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE

APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

Aplikasi Umum

Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

Pengaturan Aplikasi Umum

- Penetapan Aplikasi Umum oleh Menteri PANRB
- Pembangunan berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional
- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Menteri Kominfo
- Pembangunan dan Pengembangan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan
- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum

APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

Aplikasi Umum

Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

Pengaturan Aplikasi Sejenis

- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum
- Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan
- Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis
- Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum
- Mendapatkan pertimbangan dari Menteri Kominfo

APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

Aplikasi Umum

Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

Pengaturan Aplikasi Khusus

- Pembangunan dan Pengembangan berdasarkan Arsitektur SPBE masing-masing instansi
- Mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB
- Pembangunan dan pengembangan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus

KEAMANAN SPBE

Penjaminan

- kerahasiaan
- Keutuhan
- Ketersediaan
- Keaslian
- kenirsangkalan

BSSN menetapkan

- standar teknis
- prosedur keamanan

Instansi Pusat dan Pemda memenuhi standar yang ditetapkan

LAYANAN SPBE

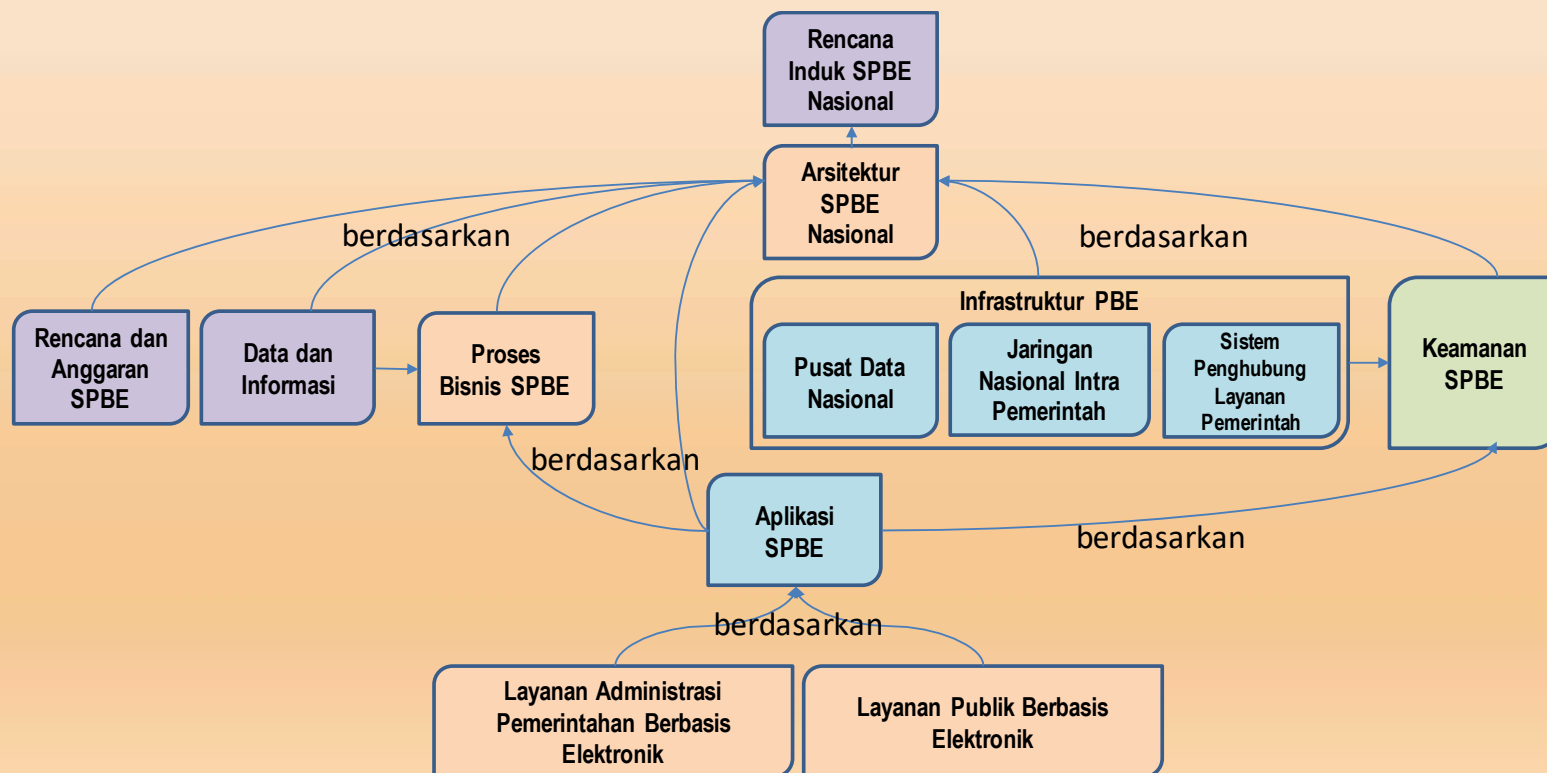
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik

- Diutamakan menggunakan aplikasi umum
- perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan

Layanan Publik berbasis Elektronik

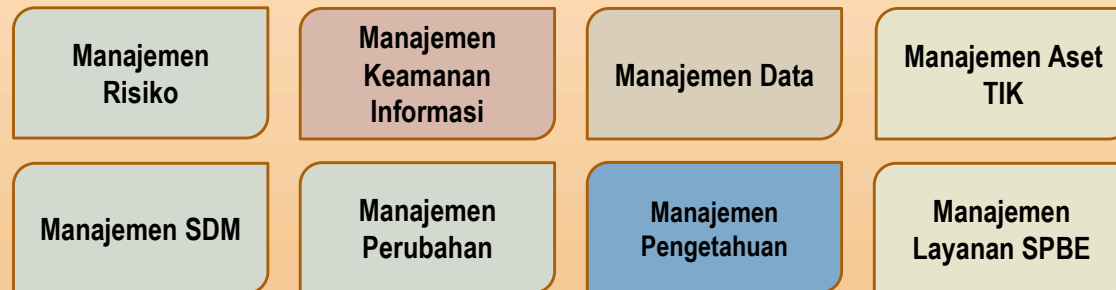
- Diutamakan menggunakan aplikasi umum
- pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya

KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE



MANAJEMEN SPBE

Pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan



AUDIT TIK

Audit infrastruktur SPBE

- Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh BPPT
- Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diaudit setiap dua tahun oleh lembaga audit TIK
- Koordinasi dengan Kementerian Kominfo

Audit Aplikasi SPBE

- Aplikasi umum diaudit setiap tahun oleh BPPT
- Aplikasi khusus diaudit setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK
- Koordinasi dengan Kementerian Kominfo

Audit Keamanan

- Audit keamanan pada infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum dilakukan setiap tahun oleh BSSN
- Audit keamanan pada infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemda serta Aplikasi Khusus dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Menteri PANRB

- Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Mengoordinasikan seluruh aktivitas SPBE Nasional
- Mengoordinasikan proses bisnis pemerintahan
- Menetapkan aplikasi umum
- Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan

Menteri Dagri

- Mengoordinasikan proses bisnis Pemda
- Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda

Menteri Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional

Kepala BPPT

- Melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum
- Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi



Menteri Kominfo

- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi
- Mengoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK
- Kebijakan umum audit TIK
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

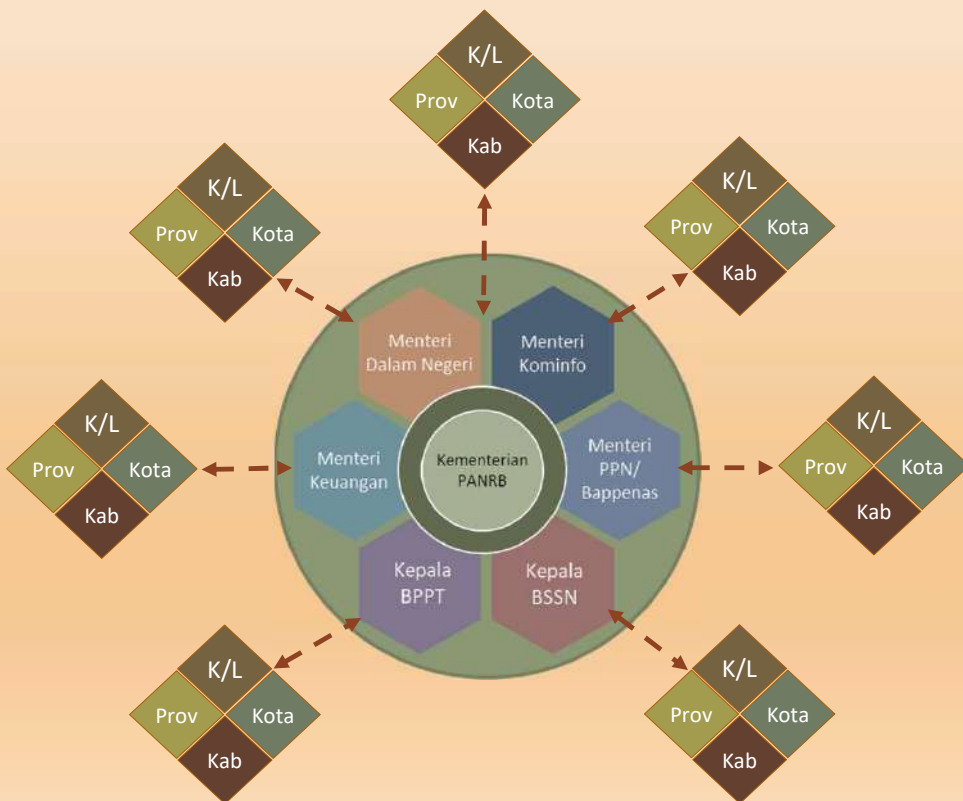
Menteri PPN/ Bappenas

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan Nasional
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Kepala BSSN

- Melaksanakan pengamanan SPBE
- Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
- Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE

KOORDINASI KETERPADUAN ANTAR K/L/D



Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

- Setiap Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan SPBE.
- Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Kepala Daerah adalah Sekretaris
- Tugas Koordinator SPBE adalah melakukan koordinasi penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

MODEL GENERIK: TIM KOORDINASI SPBE PEMDA

Sekretaris Daerah

- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemda
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

Kepala Ortala

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis Pemda

Kepala Keuangan Daerah

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK



Dinas Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

Kepala Bappeda

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE Pemda
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Kepala Perangkat Daerah

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE Pemda
- Mengelola layanan SPBE

PERCEPATAN SPBE

DISELESAIKAN DALAM WAKTU 2 TAHUN

DISELESAIKAN
DALAM WAKTU
3 TAHUN



Penganggaran berbasis Kinerja

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, monev
- Koordinator: Kementerian PPN/ Bappenas



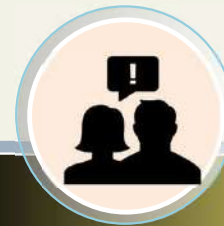
Kepegawaian

- Integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah
- Koordinator: Kementerian PANRB



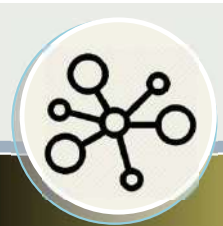
Kearsipan

- Integrasi e-dokumen persuratan (arsip dinamis)
- Koordinator: Kementerian PANRB



Pengaduan Masyarakat

- Integrasi pengaduan pelayanan publik
- Koordinator: Kementerian PANRB



Infrastruktur TIK

- Pusat Data Nasional
- Jaringan Intra-Pemerintah
- Koordinator: Kementerian KOMINFO

PERCEPATAN SPBE

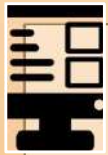
Layanan Spbe Yang Mendukung Kegiatan Pemerintahan Di Bidang:



Perencanaan



Penganggaran



Pengadaan
Barang dan Jasa



Akuntabilitas
Kinerja



Pemantauan dan
Evaluasi



Kearsipan



Kepegawaian



Pengaduan
Pelayanan Publik



**MORATORIUM PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI UMUM**

Pasal 63 ayat (3) setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum



TAHAPAN



EVALUASI SPBE

TUJUAN



Mengetahui
capaian kemajuan
pelaksanaan SPBE
pada Instansi Pusat
dan Pemerintah
Daerah



Memberikan saran
perbaikan untuk
peningkatan
kualitas
pelaksanaan SPBE



Menjamin kualitas
pelaksanaan SPBE
pada Instansi Pusat
dan Pemerintah
Daerah

PELAKSANAAN

Target

623 K/L/D/Polri



Pelaksana

Kerja sama
dengan 5
Perguruan Tinggi:
UI, UGM, PENS,
Telkom-U, UGM

Indeks SPBE

| NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 – < 4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik |
| 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup |
| 5 | < 1,8 | Kurang |

METODOLOGI EVALUASI SPBE

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan SPBE



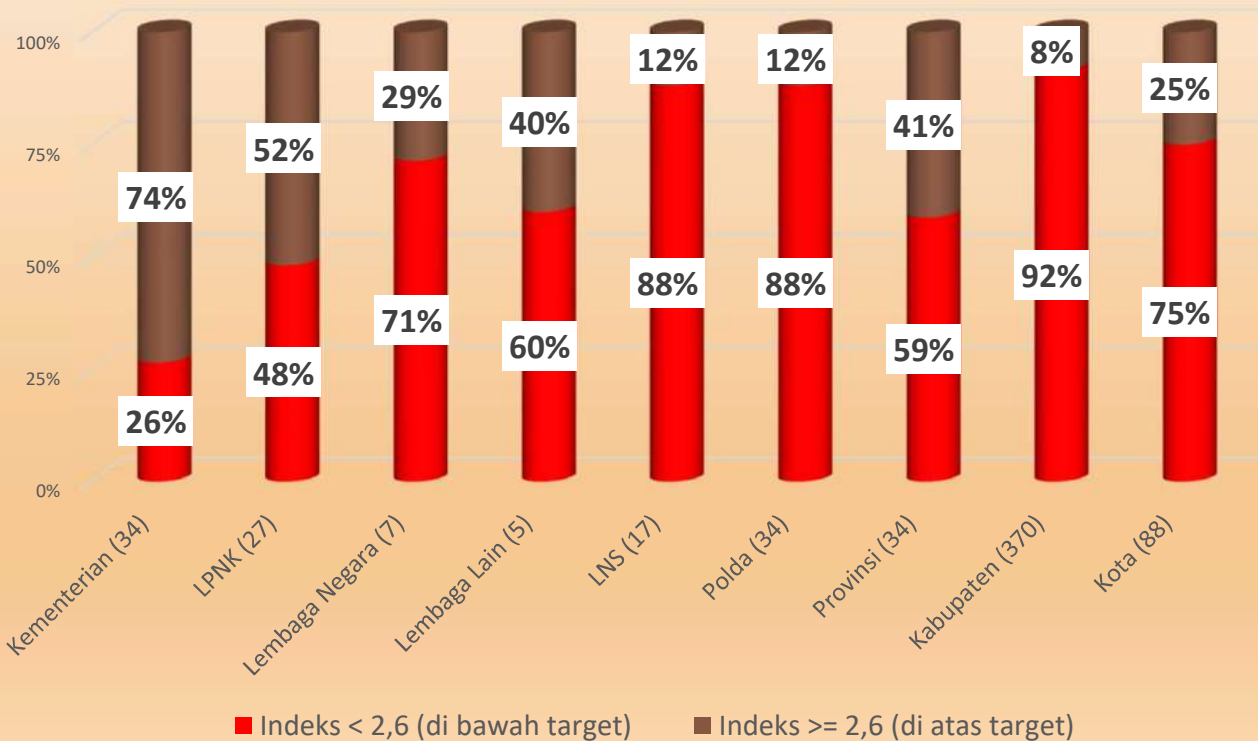
Tingkat Kematangan Kebijakan dan Tata Kelola

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Rintisan | 2 Terkelola | 3 Terstandar |
| 4 Integrasi | 5 Optimum | |

Tingkat Kematangan Layanan

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 Informasi | 2 Interaksi | 3 Transaksi |
| 4 Kolaborasi | 5 Optimum | |

DISTRIBUSI NILAI INDEKS SPBE NASIONAL



Indeks SPBE Minimal Berpredikat Baik (Indeks \geq 2,6)



616 K/L/D/Polri dievaluasi



116 IP (19%) dengan Predikat Baik



500 IP (81%) belum memenuhi Predikat Baik

Distribusi Hasil Evaluasi Indeks SPBE Tertinggi Tahun 2021



| Nama Instansi | Indeks SPBE |
|--|-------------|
| Kementerian Komunikasi dan Informatika | 3,82 |
| Badan Pusat Statistik | 3,81 |
| Kementerian Keuangan | 3,72 |
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3,68 |
| Pemerintah Provinsi Bali | 3,68 |
| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 3,66 |
| Pemerintah Kab. Bantul | 3,62 |
| Pemerintah Kab. Banyuwangi | 3,53 |
| Pemerintah Kab. Sumedang | 3,52 |

- ARSITEKTUR SPBE UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN
- BAGIAN V ARSITEKTUR SPBE (PROSES BISNIS – LAYANAN – DATA DAN INFORMASI)
- Manajemen resiko ppt
- (366) Sosialisasi Manajemen Resiko pada Pemerintah Daerah - YouTube
- Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020
- Kuisisioner SPBE
- HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
- KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN MASTER PLAN SPBE
- PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALINAU
- Dokumen Peta Rencana SPBE KALTARA
- Dokumen Arsitektur SPBE KALTARA 2022
- <https://spbe.co.id/2022/04/21/mengenal-sembilan-instansi-peraih-nilai-spbe-tertinggi-tahun-2021%ef%bf%bc/>
- SATU DATA



TERIMA KASIH